Hukum Ibarat Baju yang Menyesuaikan Bentuk Badan

Dharma Setiawan Negara
Universitas Sunan Giri Surabaya
dharmajournal1@gmail.com

Abstrak

Hukum, seperti baju yang harus disesuaikan dengan bentuk tubuh, memerlukan fleksibilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai instrumen yang mengatur kehidupan sosial, hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial, dan dinamika globalisasi. Hukum yang kaku dan tidak adaptif berisiko menjadi usang dan kehilangan efektivitasnya dalam menjaga keadilan dan keteraturan. Artikel ini mengkaji pentingnya adaptasi hukum dalam menghadapi perubahan sosial serta tantangan yang muncul dalam proses penyesuaian tersebut. Melalui analogi baju, diungkapkan bahwa hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan "bentuk tubuh" masyarakat akan lebih efektif dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, fleksibilitas hukum menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan fungsionalitasnya dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kini dan masa depan.

Kata Kunci : Hukum, Efektivitas, Fleksibilitas.

Pendahuluan

Seperti baju yang harus disesuaikan dengan bentuk tubuh agar nyaman dan sesuai dengan fungsinya, hukum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hukum bukanlah entitas statis; ia adalah cerminan dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat yang berubah dengan cepat, baik karena perkembangan teknologi, globalisasi, atau perubahan nilai-nilai sosial, hukum yang kaku dan tidak adaptif bisa menjadi usang dan kehilangan relevansinya.

Setiap masyarakat memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, hukum diibaratkan sebagai baju yang harus disesuaikan dengan "bentuk tubuh" masyarakatnya. Sebagaimana baju yang tidak sesuai ukuran dapat membatasi gerak dan kenyamanan, hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial dapat menimbulkan ketidakadilan, memperburuk konflik, dan bahkan merusak tatanan sosial.

Pendahuluan ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam sistem hukum dan bagaimana hukum harus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Melalui analogi ini, diharapkan pembaca dapat memahami peran krusial adaptasi hukum dalam menjaga keadilan dan keteraturan di tengah masyarakat yang dinamis. Dalam penulisan ini, akan dibahas bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian tersebut.

Pembahasan

Hukum, sebagai perangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki karakteristik yang dinamis. Dinamika ini terwujud dalam kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.¹ Seperti halnya baju yang harus disesuaikan dengan bentuk tubuh agar nyaman dan fungsional, hukum juga harus terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.²

Dalam sejarah, kita dapat melihat bagaimana hukum berkembang dari satu era ke era lain, menanggapi perubahan sosial, politik, dan teknologi. Misalnya, munculnya internet dan teknologi

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16-20

² Robert B. Seidman, *Law, Order and Power* (Bobbs-Merrill, 1970), hlm. 44-45.

digital telah menuntut adanya pembaruan dalam hukum terkait privasi, perlindungan data, dan kejahatan siber. Tanpa adanya penyesuaian, hukum yang ada tidak akan mampu mengatur fenomena baru yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut.

Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu mencerminkan dan menjawab kebutuhan masyarakat.³ Setiap masyarakat memiliki karakteristik dan dinamika yang unik, sehingga hukum yang berlaku harus dapat menyesuaikan dengan konteks tersebut.⁴ Dalam hal ini, hukum yang terlalu kaku atau tidak fleksibel dapat menghambat perkembangan dan menciptakan ketidakadilan.

Fleksibilitas hukum memungkinkan adanya penyesuaian terhadap perubahan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, perubahan dalam persepsi terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak di banyak negara telah mendorong perubahan dalam undang-undang yang memberikan perlindungan lebih baik bagi kelompok-kelompok ini. Tanpa adanya fleksibilitas, hukum tidak akan dapat mengikuti perubahan dalam pemahaman moral dan etika yang ada di masyarakat.

Meskipun penting, proses menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat bukanlah tanpa tantangan.⁵ Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari dalam sistem hukum itu sendiri maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin merasa dirugikan oleh perubahan tersebut.⁶

Proses legislasi yang sering kali panjang dan kompleks juga menjadi tantangan tersendiri. Sementara kebutuhan untuk mengubah hukum bisa muncul dengan cepat, proses untuk merumuskan, mengesahkan, dan menerapkan perubahan hukum sering kali membutuhkan waktu

³ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 1961), hlm. 45-46.

⁴ Antony Allott, *The Limits of Law* (Butterworths, 1980), hlm. 12-15

⁵ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986), hlm. 87-89

⁶ Max Weber, *Economy and Society* (University of California Press, 1978), hlm. 212-214.

yang lama. Hal ini dapat menyebabkan adanya ketertinggalan antara hukum yang berlaku dan kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, terdapat juga risiko bahwa penyesuaian hukum yang terlalu cepat atau terburu-buru dapat mengakibatkan hukum yang tidak stabil atau bahkan kontradiktif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebutuhan untuk perubahan yang cepat dengan kebutuhan untuk stabilitas hukum.

Dalam konteks global, kita bisa melihat bagaimana hukum internasional berkembang untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia.⁷ Negara-negara harus menyesuaikan hukum domestik mereka dengan komitmen internasional yang telah mereka sepakati, sehingga hukum domestik dapat sejalan dengan norma-norma global yang terus berkembang.

Tren terbaru dalam dunia hukum semakin berubah dengan kehadiran teknologi yang mendalam.⁸ Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah digitalisasi proses hukum. Pengacara saat ini lebih sering menggunakan platform online untuk konsultasi, penelitian, dan persidangan.⁹ Proses pengadilan yang dulunya dilakukan secara tatap muka kini bisa berlangsung melalui video conference,¹⁰ memberikan akses yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, hadirnya sistem manajemen kasus berbasis cloud memungkinkan pengacara untuk mengelola berkas, dokumen, dan jadwal pemeriksaan dengan lebih efisien.¹¹ Tren ini tidak hanya

⁷ Philip Allott, *Eunomia: New Order for a New World* (Oxford University Press, 1990), hlm. 34-38.

⁸ Eric T. Schneiderman, *Digital Transformation in Law: The Future of Legal Technology* (Cambridge University Press, 2021), hlm. 15-18

⁹ Richard Susskind, *Online Courts and the Future of Justice* (Oxford University Press, 2019), hlm. 53-60

¹⁰ Frank Pasquale, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information* (Harvard University Press, 2015), hlm. 88-90.

¹¹ Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future* (Oxford University Press, 2017), hlm. 112-115

menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya yang biasanya terkait dengan proses hukum tradisional.

Inovasi teknologi dalam praktik hukum juga mencakup penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu dalam analisis dan penelusuran data hukum.¹² Dengan AI, pengacara dapat mengidentifikasi pola dalam kasus yang serupa dan mendapatkan rekomendasi yang didasarkan pada hasil sebelumnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum. Selain itu, penggunaan blockchain dalam dokumen hukum menjanjikan transparansi dan keamanannya melalui mekanisme yang tidak dapat diubah.¹³ Adanya smart contracts adalah contoh konkret bagaimana teknologi ini dapat memengaruhi cara transaksi hukum dilakukan,¹⁴ di mana syarat dan ketentuan dapat diprogram ke dalam kontrak sehingga eksekusi otomatis dapat dilakukan ketika ketentuan terpenuhi. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga pengubah fundamental dalam cara hukum diterapkan dan diadministrasikan.

Memanfaatkan teknologi terbaru dan mengikuti tren yang berkembang menjadi hal krusial bagi praktik hukum modern. Bagi para pengacara, dosen, dan mahasiswa, mempelajari dan beradaptasi dengan perkembangan ini akan meningkatkan daya saing dan efektivitas mereka di lapangan. Sebuah alat yang sangat berguna adalah mengikuti seminar dan pelatihan tentang teknologi hukum, karena ini dapat membuka wawasan baru dan memperkenalkan cara-cara inovatif untuk menyelesaikan masalah hukum.

¹² Michael A. Livermore & Daniel N. Rockmore, *Law as Data: Computation, Text, and the Future of Legal Analysis* (Santa Fe Institute Press, 2021), hlm. 45-49.

¹³ Primavera De Filippi & Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018), hlm. 29-32.

¹⁴ Kevin Werbach, *The Blockchain and the New Architecture of Trust* (MIT Press, 2018), hlm. 73-76.

Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum nasional dan internasional.¹⁵ Proses globalisasi yang terjadi saat ini mendorong terjadinya interaksi yang semakin kompleks antara negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa norma-norma dan peraturan yang berlaku tidak hanya ditentukan oleh hukum dalam satu negara saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan dan kerjasama internasional. Hukum internasional mulai dilihat sebagai fondasi yang penting untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara berbagai sistem hukum yang ada. Pengaruh ini terlihat, misalnya, dalam komitmen negara-negara untuk memenuhi perjanjian internasional dan norma-norma global yang diakui, seperti hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum di tingkat domestik sering kali harus menyesuaikan diri dengan standar internasional, menciptakan tantangan bagi negara-negara yang memiliki tradisi hukum yang berbeda.

Harmonisasi hukum menjadi sangat penting dalam konteks global saat ini.¹⁶ Dengan semakin terhubungkannya perekonomian dan budaya di seluruh dunia, perbedaan hukum antar negara dapat menimbulkan ketidakpastian dan sengketa. Misalnya, dalam perdagangan internasional, perbedaan dalam regulasi dapat menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha yang ingin beroperasi di pasar luar negeri. Dalam hal ini, harmonisasi hukum dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas dan konsisten, yang memungkinkan negara-negara untuk bekerjasama secara lebih efektif. Upaya harmonisasi ini tidak hanya terbatas pada hukum perdagangan, tetapi juga meliputi berbagai area lain seperti perlindungan data pribadi, lingkungan, dan hak-hak pekerja. Dalam menghadapi tantangan global, penting bagi negara-negara untuk

¹⁵ Neil Walker, *Intimations of Global Law* (Cambridge University Press, 2015), hlm. 25-28.

¹⁶ Gunther Teubner, *Global Law Without a State* (Dartmouth Publishing Company, 1997), hlm. 112-117.

beradaptasi dan mencari solusi bersama yang dapat diterima secara keseluruhan, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam ranah yang semakin terintegrasi ini.

Sebagai tambahan, pendekatan proaktif dalam memahami dan menerapkan hukum di era globalisasi akan sangat membantu para akademisi dan praktisi hukum. Mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum internasional dan praktik di negara lain dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang kemungkinan solusi bagi permasalahan hukum yang ada. Hal ini juga membuka peluang untuk kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara berbagai aktor, termasuk pengacara, mahasiswa hukum, dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan responsif terhadap tantangan global adalah langkah yang penting di era modern ini.

Perubahan sosial dan budaya merupakan fenomena yang terus-menerus terjadi di masyarakat.¹⁷ Hukum, sebagai sistem yang dirancang untuk mengatur tindak tanduk manusia dalam komunitas, sering kali harus berhadapan dengan tantangan besar dalam menghadapi dinamika ini. Ketika nilai dan norma dalam masyarakat berubah, hukum tidak selalu mampu beradaptasi dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketika orang-orang merasa hukum tidak lagi mencerminkan realitas sosial yang mereka hadapi. Misalnya, perubahan pandangan terhadap hak asasi manusia dan gender telah mendorong revisi dalam banyak undang-undang, tetapi proses ini tidak selalu sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 88-91.

Selain itu, globalisasi membawa serta pengaruh yang kuat terhadap budaya lokal, yang seringkali mengaburkan batas-batas antara norma yang diakui secara lokal dan internasional.¹⁸ Dalam konteks ini, penerapan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai universal tanpa mengabaikan keunikan budaya lokal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pengacara, hakim, dan penegak hukum lainnya untuk menjamin bahwa hukum tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Di tengah perubahan yang cepat, hukum memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum perlu diorientasikan kepada pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama yang rentan. Misalnya, aturan yang melindungi hak pekerja, hak atas lingkungan yang bersih, dan hak sipil perlu ditegakkan dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi.

Lebih lanjut, hukum juga harus mampu menciptakan kerangka kerja yang mendukung pembangunan berkelanjutan.¹⁹ Dalam konteks ini, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kebijakan pembangunan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam sangat penting. Dengan memastikan bahwa keputusan hukum mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan, hukum dapat berkontribusi pada terciptanya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Untuk itu, semua pihak, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum, perlu berkolaborasi dalam merancang undang-undang yang tidak hanya responsif tetapi juga proaktif terhadap

¹⁸ Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense* (Butterworths, 2002), hlm. 101-105.

¹⁹ Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (Ashgate Publishing, 2008), hlm. 65-68.

perubahan sosial yang terjadi. Dengan melakukan penelitian mendalam dan mengedukasi masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, peran hukum dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat direalisasikan dengan lebih efektif.

Di tingkat lokal, hukum adat atau hukum lokal sering kali harus disesuaikan dengan hukum nasional atau internasional. Dalam beberapa kasus, penyesuaian ini dapat menciptakan harmonisasi antara norma lokal dan norma nasional atau internasional, tetapi di kasus lain, hal ini dapat menimbulkan konflik yang harus diselesaikan dengan hati-hati.

Lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif semuanya memainkan peran penting dalam proses penyesuaian hukum.²⁰ Lembaga legislatif bertanggung jawab untuk membuat dan mengubah undang-undang, sementara pengadilan sering kali menjadi arena di mana interpretasi hukum disesuaikan dengan kondisi faktual yang berkembang. Selain itu, lembaga eksekutif juga memiliki peran dalam menegakkan hukum yang telah disesuaikan.

Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Sering kali terjadi perbedaan interpretasi dan kepentingan antara lembaga-lembaga tersebut, yang dapat menghambat proses penyesuaian hukum. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Seperti baju yang harus disesuaikan dengan bentuk tubuh, hukum juga harus dirancang dan diadaptasi agar sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan

²⁰ Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication* (Harvard University Press, 1997), hlm. 55-57

ekonomi yang ada. Meskipun proses penyesuaian ini menghadapi berbagai tantangan, fleksibilitas hukum tetap menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tren digitalisasi dalam proses hukum, seperti penggunaan platform online, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain, menunjukkan bagaimana teknologi telah menjadi pengubah fundamental dalam cara hukum diterapkan dan diadministrasikan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan peluang untuk keadilan yang lebih inklusif dan akses yang lebih luas terhadap layanan hukum.

Saran

kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan sangat penting dalam merancang hukum yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan-tantangan global dan lokal. Dengan terus memperbarui pemahaman kita tentang hukum dan mengintegrasikan teknologi serta pendekatan global, kita dapat memastikan bahwa hukum tetap menjadi fondasi yang kuat untuk keadilan dan ketertiban di dunia yang semakin kompleks ini.

Daftar Pustaka

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975)
- Robert B. Seidman, *Law, Order and Power* (Bobbs-Merrill, 1970)
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 1961)
- Antony Allott, *The Limits of Law* (Butterworths, 1980)
- Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986)
- Max Weber, *Economy and Society* (University of California Press, 1978)
- Philip Allott, *Eunomia: New Order for a New World* (Oxford University Press, 1990)
- Eric T. Schneiderman, *Digital Transformation in Law: The Future of Legal Technology* (Cambridge University Press, 2021)
- Richard Susskind, *Online Courts and the Future of Justice* (Oxford University Press, 2019)
- Frank Pasquale, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information* (Harvard University Press, 2015)
- Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future* (Oxford University Press, 2017)
- Michael A. Livermore & Daniel N. Rockmore, *Law as Data: Computation, Text, and the Future of Legal Analysis* (Santa Fe Institute Press, 2021)
- Primavera De Filippi & Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018)
- Kevin Werbach, *The Blockchain and the New Architecture of Trust* (MIT Press, 2018)
- Neil Walker, *Intimations of Global Law* (Cambridge University Press, 2015)
- Gunther Teubner, *Global Law Without a State* (Dartmouth Publishing Company, 1997)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975)
- Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense* (Butterworths, 2002)

Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (Ashgate Publishing, 2008)

Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication* (Harvard University Press, 1997)